

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditinjau dari segi ekonomi, Jepang merupakan negara dengan stabilitas ekonomi kuat yang menopang perekonomiannya melalui industrialisasi dan perdagangan internasional. Semenjak Perang Dunia Kedua (PD II) berakhir Jepang mencoba melakukan restorasi pada perekonomiannya. Dengan memacu faktor-faktor produksi yang dimiliki, Jepang berhasil meningkatkan angka pertumbuhan ekonominya sehingga pada tahun 1967 menjadikannya sebagai negara dengan tingkat Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) terbesar kedua di dunia dengan pertumbuhan lebih dari 10% per tahun.¹ Performa ekonomi tersebut terus dipertahankan sepanjang dekade 1970an dan 1980an. Keberhasilan Jepang tersebut tidak terlepas dari dukungan ekspansi investasi modal swasta yang dipengaruhi oleh tingginya presentase tabungan (*savings*); perubahan besar-besaran populasi pekerja di sektor industri primer ke sektor industri sekunder dengan tingkat kualitas tenaga kerja yang tinggi; serta meningkatnya produktivitas berkat adanya adopsi dan perbaikan teknologi asing yang lebih modern.²

Keberhasilan Jepang dalam membangun perekonomiannya tidak terlepas dari keikutsertaan Jepang dalam GATT (yang selanjutnya berganti menjadi WTO) pada tahun 1955. Sejak saat itu Jepang sangat berkomitmen dengan mekanisme liberalisasi perdagangan multilateral dalam menjalankan kebijakan perdagangan internasionalnya. Mekanisme WTO memberikan banyak keuntungan bagi Jepang, karena mekanisme tersebut mendorong liberalisasi dalam perdagangan barang dan jasa yang tidak lain merupakan keunggulan dari Jepang, maka tidak mengherankan jika pemerintah Jepang sangat aktif mendukung kebijakan perdagangan WTO.

Namun ditengah-tengah penguatan komitmen Jepang terhadap mekanisme WTO tersebut, justru terjadi perkembangan yang sangat mengejutkan yakni berkembangnya liberalisasi perdagangan di luar mekanisme WTO yang ditandai

¹ Biro Statistik Jepang, dalam “*Statistical Handbook of Japan 2007 Chapter 3 Economy; Economic Development*”, diakses dari <http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/pdf/c03cont.pdf>, tanggal 29 Maret 2009, pukul 20.13 WIB.

² *Ibid.*

dengan maraknya pembentukan *Preferential Tariff Agreement* (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut PTA) dalam bentuk *Regional Trade Agreement* (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut RTA) dan *Free Trade Agreement* (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut FTA bilateral).

Dalam wacana pembentukan FTA, Jepang termasuk salah satu negara maju yang tertinggal dibandingkan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (EU). Karena semenjak berkomitmen dengan mekanisme multilateral WTO, Jepang menilai kesepakatan kerjasama dalam kerangka FTA bilateral justru kontraproduktif bagi sistem perdagangan global yang berjalan dalam mekanisme multilateral WTO. Sehingga tidak mengherankan jika hingga tahun 1998, Jepang masih menolak terlibat dalam pembentukan FTA karena menganggap kesepakatan tersebut dapat memberi ekses negatif dan berbahaya bagi negara lain yang tidak terlibat dalam FTA tersebut.³ Namun seiring dengan tekanan beberapa peristiwa yang terjadi, pada akhirnya memaksa Jepang untuk mengubah pandangan konvensionalnya tersebut dengan menata ulang strategi perdagangan yang semula berfokus dalam kerangka kerja bilateral dan multilateral WTO pada pembentukan kesepakatan perdagangan regional (*Free Trade Agreement/FTA*).⁴ Terlebih beberapa tahun belakangan peningkatan kerjasama melalui FTA lebih condong dilihat sebagai pelengkap ketimbang sebagai kontradiksi bagi mekanisme WTO.⁵

1.1.1 Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Proliferasi FTA Jepang

Adapun peristiwa-peristiwa yang menjadi faktor pendorong lahirnya proliferasi FTA, salah satunya adalah kebuntuan putaran perundingan WTO terutama karena tidak tercapainya kesepakatan mengenai isu di sektor pertanian. Isu pertanian dianggap menjadi isu yang sensitif bermula ketika GATT pada

³ Michael Sutton, "Japanese Trade Policy and Economic Partnership Agreement: A New Conventional Wisdom", dalam *Ritsumeikan Annual Review of International Studies*, 2005, Vol. 4, diakses dari <http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/collage/bulletin/e-vol4/sutton.pdf>, tanggal 1 April 2009, pukul 11.20 WIB.

⁴ Karena ketika rejim perdagangan di tingkat multilateral macet, negara-negara tidak bisa mengambil manfaat perdagangan dari perundingan tersebut, maka mereka beramai-ramai mencari celah untuk menghindari kerugian dengan mengalihkan strategi perdagangannya ke tingkat bilateral atau regional.

⁵ JETRO, "EPA-Parallel Studies Recommend FTA between Japan and Chile" dalam *Summary Of Study Report On The Japan-Chile Free Trade Agreement*, 7 Juni 2001, Vol. 23, diakses dari http://www.jetro.go.jp/en/reports/survey/epa/fta_chile/summary_jetro20010607.html, tanggal 26 Maret 2009, pukul 04.53 WIB.

tahun 1955 atas desakan Amerika Serikat (AS) dipaksa mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan pembebasan tuntutan atas semua kebijakan yang dapat menimbulkan konflik pada kebijakan pertanian Amerika Serikat, dan hal tersebut didukung oleh negara-negara lain.⁶ Sehingga sejak saat itu isu mengenai sektor pertanian dianggap sebagai suatu “kasus yang khusus”.⁷

Masalah kemudian timbul ketika negara-negara maju meningkatkan proteksionisme dengan memberikan subsidi domestik yang tinggi guna melindungi sektor pertaniannya. Dan hal tersebut sangat ditentang oleh negara-negara berkembang yang memang sebagian besar mengandalkan ekonominya dari perdagangan sektor pertanian. Hal inilah yang membuat Isu sektor pertanian menjadi masalah pokok (*major sticking point*) dari seluruh putaran.⁸ Kompleksitas isu dan semakin bertambahnya jumlah anggota WTO yang berjuang demi kepentingannya masing-masing, pada akhirnya juga mendorong putaran perundingan ke arah kebuntuan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan permasalahan yang sangat serius terhadap perdagangan internasional hingga saat ini.⁹

Faktor lain yang mendorong proliferasi FTA bagi Jepang adalah krisis Asia 1997. Krisis ekonomi Asia saat itu muncul sebagai dampak menular (*contagion effect*) krisis yang diawali di Thailand ke negara-negara di selatan dan ke utara ke Korea Selatan.¹⁰ Thailand, Korea Selatan dan Indonesia adalah negara yang paling parah terkena dampak krisis ini.¹¹ Krisis tersebut tidak hanya meluluh-lantakkan perekonomian ketiga negara tersebut, tetapi juga memberikan tekanan pada perekonomian Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Meskipun secara ekonomi kedua negara tersebut tidak hancur, tetapi krisis tersebut memberikan pukulan kuat pada perekonomiannya.¹² Pada 27 Oktober 1997, Industri Dow Jones jatuh

⁶ Ratya Anindita dan Michael R. Reed, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hal. 68.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hal.70.

⁹ Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional*, 5th Edition, (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 7.

¹⁰ “Beda Krisis 1997 dari Krisis Global”, diakses dari <http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=28498620653e59a7e22c2b50748e2766&jenis=d645920e395fedad7bbbed0e3a3fe2e0&PHPSESSID=6769526b3f1cf9860b6f8d674aec57b3>, tanggal 3 April 2009, pukul 20.05 WIB.

¹¹ *Ibid.*

¹² Rajnish Tiwari, “Post-Crisis Exchange Rate Regimes in Southeast Asia”, disampaikan dalam Seminar paper bertempat di University of Hamburg, pada 22 Juli 2003.

554-point, atau 7,2 persen, karena kecemasan ekonomi Asia, sementara itu Bursa Saham New York menunda sementara perdagangannya.¹³ Krisis ini menyebabkan jatuhnya konsumsi dan keyakinan mengeluarkan uang.

Jepang terpengaruh karena ekonominya berperan penting di wilayah Asia. Negara-negara Asia biasanya menjalankan defisit perdagangan dengan Jepang karena ekonomi Jepang dua kali lebih besar dari negara-negara Asia lainnya bila dijumlahkan, selain itu sekitar 45% perdagangan internasional Jepang ditujukan ke negara-negara di Asia.¹⁴ Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan nyata GDP Jepang melambat. Jika pada tahun 1960an perekonomian Jepang berada pada masa kejayaannya dengan pertumbuhan rata-rata 10% per tahun. Sementara pada tahun 1980-an sekitar 4% per tahun, maka tahun 1997, dari 5% ke 1,6% per tahun dan turun menjadi resesi pada 1998 ketika terjadinya krisis Asia.¹⁵

Kenyataan ini memberikan kesadaran perlu adanya kerjasama regional di bidang finansial yang belakangan dijajaki negara-negara yang tergabung dalam forum ASEAN maupun ASEAN+3 (ASEAN plus Cina, Jepang, dan Korea Selatan). Meskipun perkembangan kerja sama tersebut terkesan berjalan lebih lambat dan masih sebatas upaya pembenahan infrastruktur finansial dan perjanjian swap devisa. Namun bukan berarti proses dialog dan kerja sama regional di bidang finansial mengalami stagnasi. Kendati berjalan lambat, derajat kerja sama di forum ASEAN ataupun ASEAN+3 cukup meningkat, terutama setelah terjadi krisis keuangan berskala regional tahun 1997. Ketakutan dan bayangan serangan spekulatif yang memicu depresi ekonomi di sebagian besar kawasan Asia Timur menyadarkan negara-negara tersebut untuk mempererat kerja samanya di bidang finansial.¹⁶ Terutama bagi Jepang, sebagai sebuah kekuatan ekonomi di kawasan Asia, mereka menyadari bahwa negaranya tidak bisa terlepas dari perkembangan kawasan dan memiliki ketergantungan dengan negara-negara

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hisane Masaki, "Free trade: Japan and Switzerland?", dalam *Asia Times*, 25 Januari 2007, diakses dari http://www.bilaterals.org/article-print.php3?id_article=703, tanggal 12 Maret 2009, pukul 21.12 WIB.

¹⁵ "Ekonomi Jepang", diakses dari <http://www.economicexpert.com/a/Economy:of:Japan.htm>, tanggal 12 Maret 2009, pukul 13.05 WIB.

¹⁶ David E. Sumual, "Tren Kerja Sama Finansial Regional dan Dampaknya bagi Indonesia", diakses dari <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/12/finansial/962011.htm>, tanggal 2 April 2009, pukul 20.06 WIB.

tetangganya.¹⁷ Terlebih mengingat tingginya tingkat kebutuhan akan investasi asing serta adanya kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi ekonomi domestik oleh negara-negara di Asia pasca krisis mendorong meningkatnya kecenderungan pembentukan FTA di kawasan ini. Kondisi tersebut mengharuskan Jepang merespon dengan tepat FTAs yang dilakukan oleh negara-negara tetangganya, dengan melakukan hal yang serupa, yaitu membentuk FTAs dengan beberapa negara baik yang berada di kawasan Asia maupun di luar Asia sebagai bentuk diplomasi bilateralnya.

1.1.2 FTA bagi Jepang

Strategi perdagangan regional/FTA diterjemahkan Jepang dalam bentuk kerjasama kemitraan ekonomi/*Economic Partnership Agreements* (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut EPA). Pemerintah Jepang dalam cetak biru diplomatiknya tidak memisahkan bahasan mengenai kesepakatan perdagangan bebas (FTA) dan EPA.¹⁸ Mereka mendefinisikan EPA sebagai bentuk dari FTA, namun dengan pengaturan yang lebih komprehensif. FTA secara umum dipandang sebagai kesepakatan yang ditujukan untuk mengeliminir hambatan-hambatan dalam perdagangan dan meliberalisasi perdagangan barang dan jasa di antara negara dan kawasan yang menjadi anggotanya. Sementara itu dalam *White Paper on International Trade* yang dikeluarkan METI pada tahun 2001, EPA digambarkan sebagai kesepakatan dagang yang melampaui batas-batas eliminasi tarif yang dicakup oleh FTA tradisional tetapi dengan jangkauan (*scope*) yang lebih luas melalui peningkatan investasi, kompetisi, digitalisasi prosedur dagang, harmonisasi *e-commerce* dan sebagainya serta meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.¹⁹ Oleh karena itu istilah EPA lebih sering digunakan daripada FTA dengan argumen hal-hal yang diatur dalam EPA lebih luas dan komprehensif.

¹⁷“Jepang Siapkan Bantuan US\$17 Miliar untuk Krisis di Asia”, diakses dari http://mediaindonesia.com/read/2009/02/02/58779/39/6/Jepang_Siapkan_Bantuan_US17_Miliar_untuk_Krisis_di_Asia, tanggal 15 Maret 2009, pukul 22.15 WIB.

¹⁸ Diakses dari http://www.meti.go.jp/english/report/data/gCTo7tt_1coe.html, tanggal 15 Februari 2009, pukul 10.15 WIB.

¹⁹ METI (2001), “White Paper on International Trade: Challenges of the Foreign Economic Policy in the 21th Century”, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html>, tanggal 2 Januari 2009, pukul 14.06 WIB.

1.1.2.1 Kriteria dalam Menentukan Mitra EPA Jepang

Setelah merumuskan seberapa luas ruang lingkup/cakupan yang dapat di muat dari kesepakatan EPA yang akan dilakukannya sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya. Lebih lanjut, pemerintah Jepang juga menetapkan tiga (3) kriteria untuk mengidentifikasi negara/kawasan yang akan diajak bergabung sebagai mitra dalam pembentukan EPA-nya. Ketiga (3) kriteria tersebut adalah:²⁰ **Pertama**, kriteria menyangkut pembentukan lingkungan internasional yang menguntungkan bagi Jepang dengan pertimbangan antara lain, apakah negara/kawasan tersebut dapat mendukung upaya Jepang dalam pembentukan masyarakat (*community building*), stabilitas serta kesejahteraan di kawasan Asia Timur; atau apakah negara/kawasan tersebut berkontribusi bagi penguatan ekonomi Jepang dalam menghadapi tantangan politik dan diplomatik.

Kedua, kriteria menyangkut pencapaian untuk kepentingan ekonomi Jepang dengan pertimbangan antara lain, apakah negara/kawasan tersebut terutama terkait dengan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan tidak akan mempengaruhi keamanan pangan Jepang dan usaha pemerintah Jepang terhadap reformasi struktural di sektor-sektor tersebut; atau apakah negara/kawasan tersebut dapat meningkatkan lingkungan bisnis bagi aktivitas perusahaan Jepang melalui harmonisasi berbagai sistem, seperti pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual dan perpindahan penduduk (*movement of natural person*). **Ketiga**, kriteria menyangkut perkembangan kawasan serta kemudahan dalam pembentukan EPA.

Jika setelah dilakukan analisa dan penilaian oleh pemerintah Jepang terhadap negara calon mitra EPA lalu kemudian, diketahui negara calon mitra tersebut memenuhi salah satu atau bahkan ketiga kriteria yang telah dipersyaratkan, maka pemerintah Jepang akan mendorong pembentukan EPA dengan negara calon mitra yang dianggap potensial tersebut. Terpenuhinya salah satu atau bahkan ketiga kriteria yang dipergunakan untuk mengidentifikasi mitra EPA, akan menjadi parameter apakah negara tersebut dapat mendukung upaya

²⁰ The Ministry of Foreign Affairs Japan (MOFA), "Basic Policy towards further promotion of Economic Partnership Agreements (EPAs)", Approved by the Council of Ministry on the Promotion of Economic Partnership on December 21, 2004, diakses dari http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=1197, tanggal 15 Maret 2009, pukul 22.13 WIB.

Jepang dalam mewujudkan sasaran yang memang ingin mereka capai melalui pembentukan EPA. Sasaran-sasaran tersebut tidak lain adalah keuntungan yang akan diperoleh dari pembentukan FTA yang mereka lakukan.

1.1.2.2 Keuntungan yang Diperoleh dari Pembentukan FTA

Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa giatnya Jepang dalam mempromosikan pembentukan FTA tidak terlepas dari keuntungan yang akan diperolehnya. Menurut laporan singkat berjudul "*Japan's FTA Strategy*" yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Jepang tahun 2002, disebutkan bahwa pemerintah Jepang akan memperoleh dua keuntungan sekaligus melalui setiap kesepakatan pembentukan FTA yang berhasil mereka capai, yakni:²¹ **Pertama**, keuntungan dari segi ekonomi. Melalui FTA ini diharapkan dapat menciptakan ekspansi pasar ekspor bagi produk-produk Jepang, mengalihkan struktur industri kearah yang lebih efektif, dan membantu memperbaiki lingkungan bisnis sehingga lebih kompetitif. Selain itu, FTA juga dapat mengurangi friksi yang timbul dari ekonomi menjadi isu politik dan membantu mengharmonisasikan regulasi dan sistem terutama yang terkait dengan sektor perdagangan.

Kedua, terkait dengan keuntungan dari segi politik dan diplomasi. FTA diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar Jepang dalam mekanisme perundingan di WTO, dan melalui pendalaman interdependensi ekonomi sebagai implikasi dari pembentukan FTA diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan politik di antara negara-negara yang bermitra, sehingga pada akhirnya dapat melebarkan pengaruh dan kepentingan diplomasi Jepang di tingkat global.

Berdasarkan proyeksi keuntungan tersebut, maka tidak terdapat alasan yang dapat membuat Jepang kembali pada paradigma konservatifnya yaitu dengan tetap bersikeras atau berkomitmen dengan kerangka multilateral WTO, apalagi menghalangi Jepang mempromosikan pembentukan EPA dengan negara-negara lain di luar komunitas ASEAN. Kondisi ini menyebabkan Jepang mulai berpikir

²¹ The Ministry of Foreign Affairs Japan (MOFA), "Japan's FTA Strategy (Summary) 2002", diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/strategy0210.html>, tanggal 29 Maret 2009, pukul 23.11 WIB.

dan mempertimbangkan beberapa proposal EPA dari beberapa negara di luar kawasan regional Asia.

1.1.3 FTA Jepang dengan Beberapa Negara/Kawasan lainnya

Tidak lama setelah badai krisis keuangan menerjang Asia Tenggara, tepatnya di tahun 2002 Jepang mulai mengadakan kesepakatan pembentukan EPA. EPA pertama dibuat pada tahun 2002 dengan salah satu negara di kawasan regional Asia, yaitu Singapura. Hingga September tahun 2007 faktanya Jepang sudah mengantongi kesepakatan EPA dengan delapan negara, di mana enam diantaranya adalah negara ASEAN. Enam negara ASEAN tersebut adalah Singapura (2002), Thailand bergabung pada (2003), kemudian disusul dengan Malaysia (2005), Filipina (2006) dan Brunei Darussalam (Juni 2007), dan terakhir dengan Indonesia pada Agustus (2007).²²

Selain dengan negara/kawasan di Asia, Jepang juga mulai memperluas pembentukan EPA dengan beberapa negara/kawasan lainnya di luar regional Asia. Ini terlihat dari beberapa kesepakatan pembentukan EPA yang berhasil dilakukannya, seperti EPA Jepang-Switzerland, EPA Jepang-Meksiko, maupun EPA Jepang-Chili. Bahkan saat ini Jepang berencana memperluas jangkauan kemitraannya hingga Timur Tengah dan Pasifik. Inisiatif pembentukan EPA antara Jepang dengan beberapa negara/kawasan lainnya merupakan perwujudan dari diplomasi ekonomi bilateral Jepang dalam beradaptasi dengan tantangan eksternal khususnya dalam konteks persaingan ekonomi kawasan.²³

1.2 Rumusan Masalah

Secara logika, kompleksnya kriteria yang dipergunakan pemerintah Jepang dalam menentukan atau memilih mitra EPA, sangat mungkin menimbulkan persamaan atau justru perbedaan pada kriteria yang menyebabkan suatu

²² Benny S. Butar-Butar, "EPA Indonesia-Jepang, Siapa Diuntungkan?", dimuat dalam *Lampung Post*, edisi Rabu 5 September 2007, diakses dari <http://www.lampungpost.com/aktual/cetak.php?id=2143>, tanggal 29 Maret 2009, pukul 23.05 WIB.

²³ Vittor R. Tahar, "Diplomasi Ekonomi Indonesia-Jepang", diakses dari <http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/diplomasi%20-%20Sp.pdf>, tanggal 26 Maret 2009, pukul 04.22 WIB.

negara/kawasan dipilih sebagai mitra EPA yang potensial.²⁴ Termasuk jika ketiga kriteria yang ada dianalisis terhadap beberapa negara di kawasan berbeda secara bersamaan atau jika dipilih salah satu dari kriteria yang ada kemudian dianalisis terhadap beberapa negara di berbagai kawasan. Perbedaan dalam penerapan pola analisis akan membedakan hasil yang akan diperoleh. Sebagai contoh mengenai EPA Jepang dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura maupun Thailand. Beberapa penelitian mengungkapkan, bahwa dipilihnya negara/kawasan tersebut memang karena negara/kawasan tersebut memenuhi kriteria yang telah dirumuskan oleh pemerintah Jepang. Kriteria tersebut antara lain menyangkut pembentukan lingkungan internasional yang menguntungkan bagi Jepang dengan pertimbangan, negara/kawasan tersebut dapat mendukung upaya Jepang dalam pembentukan masyarakat (*community building*), stabilitas serta kesejahteraan di kawasan Asia Timur. Sebagai negara-negara pendiri ASEAN kelimanya memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama kawasan Asia Timur. Bagaimana tidak, kawasan ini memiliki tiga negara yang menjadi kekuatan ekonomi berpengaruh di dunia saat ini, yakni China, Korea Selatan, dan Jepang.

Salah satu yang paling menarik dari pola hubungan antar ketiga negara ini adalah hubungan politik yang cenderung konfliktual yang lebih mengisyaratkan persaingan dibandingkan kerjasama. Namun, aroma hubungan konfliktual berlatar sejarah tersebut ternyata tidak berlaku dalam hubungan ekonomi, karena nyatanya ketiga negara tersebut justru memiliki interdependensi yang sangat tinggi dalam sektor ekonomi terutama semenjak terbentuknya ASEAN+3.²⁵

Selain itu bila ditinjau dari kriteria lain, misalnya kriteria yang menyangkut pencapaian kepentingan ekonomi Jepang maka dipilihnya negara-negara ASEAN sebagai mitra EPA bukanlah suatu yang mengherankan. Karena sejak beberapa dekade lalu negara-negara tersebut sudah dikenal sebagai mitra dagang dan investasi utama bagi Jepang. Sehingga memberi perlindungan terhadap asset-asset

²⁴ Alasannya sederhana karena begitu luasnya cakupan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi masing-masing negara/kawasan yang akan diajak bermitra, sehingga sangat memungkinkan adanya keidentikan kriteria antara mitra EPA yang satu dengan yang lain.

²⁵ Jepang dan Korea Selatan menggunakan China sebagai basis produksi mikrokonduktor mereka, sementara China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Jepang.

bisnis yang telah dimilikinya di kawasan ini akan menjadi salah satu kunci untuk dapat mencapai kepentingan ekonomi sebagaimana yang diinginkan Jepang.

Namun hasil yang berbeda akan diperoleh jika kriteria yang sama yaitu menyangkut pembentukan lingkungan internasional yang menguntungkan bagi Jepang dianalisis terhadap negara-negara di kawasan Amerika Latin, Pasifik atau Eropa. Hasilnya pasti akan berbeda, terutama karena negara/kawasan tersebut tidak secara langsung dapat mendukung upaya Jepang dalam pembentukan masyarakat (*community building*), stabilitas serta kesejahteraan di kawasan Asia Timur. Tetapi memungkinkan membentuk lingkungan internasional yang menguntungkan Jepang dari sisi yang lain khususnya yang dapat dikontribusi oleh kawasan yang bersangkutan.

Contoh lain adalah jika kriteria menyangkut pencapaian kepentingan ekonomi Jepang dianalisis terhadap pembentukan EPA antara Jepang dengan negara-negara di Asia Tenggara. Selama ini negara-negara ASEAN memang telah menjadi partner dagang utama Jepang terutama menyangkut ekspor-impor sumber daya alam dan energi. Selain itu, kedekatan geografis menempatkan negara-negara tersebut sebagai prioritas dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Fakta-fakta tersebut terjadi hampir merata di seluruh negara-negara ASEAN, sehingga bila merujuk pada kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah pencapaian kepentingan ekonomi Jepang berhasil maka akan diperoleh keidentikan karakter.

Tetapi hal yang demikian tidak terjadi kriteria menyangkut pencapaian kepentingan ekonomi Jepang dianalisis terhadap proses terbentuknya EPA Jepang di kawasan regional Eropa melalui EPA Jepang-Switzerland. Negosiasi EPA antara Jepang dan Switzerland sepiantas tidak memenuhi kriteria Jepang dalam memilih mitra EPA yang potensial. Hal tersebut didasarkan pada beberapa fakta antara lain adalah tidak adanya kedekatan geografis diantara kedua negara; dari segi volume perdagangan bilateral kedua negara terbilang relatif kecil; selain itu Switzerland juga bukan merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam maupun mineral. Meskipun demikian, Jepang tetap melanjutkan negosiasi EPA dengan Switzerland.

Menurut Hisane Masaki, negosiasi di antara kedua negara tersebut dimungkinkan karena adanya kesamaan kepentingan dari kedua negara, yakni pengaturan terhadap isu pertanian di WTO.²⁶ Keduanya merupakan anggota *Group Of 10* (G10), yakni kelompok negara yang dianggap rentan terhadap impor produk pertanian. Fakta ini memenuhi kriteria menyangkut pencapaian untuk kepentingan ekonomi Jepang khususnya poin pertimbangan yang menyangkut, apakah negara/kawasan tersebut terutama terkait dengan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang tidak akan mempengaruhi keamanan pangan Jepang dan usaha pemerintah Jepang terhadap reformasi struktural di sektor-sektor tersebut. Lalu, bagaimana dengan EPA Jepang dengan beberapa negara/kawasan lain di Amerika Latin dan Karibia, seperti EPA Jepang-Chili, dan EPA Jepang-Meksiko.

Sebagaimana yang telah dinyatakan di awal bahwa kompleksitas kriteria yang dipergunakan dalam menentukan atau memilih mitra EPA, sangat mungkin menimbulkan persamaan atau justru perbedaan pada kriteria yang menyebabkan suatu negara/kawasan dipilih sebagai mitra EPA yang potensial. Untuk itu, demi kepentingan penelitian ini, maka penulis hanya akan memilih satu dari tiga kriteria yang dipergunakan untuk mengidentifikasi calon mitra EPA Jepang, yakni kriteria yang menyangkut pencapaian kepentingan ekonomi Jepang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka pertanyaan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana motif dan karakteristik yang melatarbelakangi pembentukan EPA di tiga kawasan di dunia berpengaruh terhadap pencapaian kepentingan ekonomi Jepang?

1.3 Objek dan Batasan Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah keseluruhan EPA yang berhasil dibentuk oleh Jepang dengan negara/kawasan lainnya pada periode tahun 2002-kuartal pertama tahun 2009 yang berjumlah 10. Adapun EPA tersebut adalah EPA Jepang-Indonesia (JIEPA); EPA Jepang-Singapura (JSEPA); EPA Jepang-Thailand (JTEPA); EPA Jepang-Filipina (JPEPA); EPA Jepang-Brunei

²⁶ Hisane Masaki, *Op.Cit.*

Darussalam (JBEPa); EPA Jepang-Malaysia (JMEPA); EPA Jepang-Vietnam; EPA Jepang-Meksiko; EPA Jepang-Chili (JCEPA); dan EPA Jepang-Switzerland.

Mengingat EPA yang berhasil dibentuk Jepang berada di beberapa kawasan yang berbeda dan karena kuantitasnya kurang dari tiga (3) EPA di beberapa kawasan khususnya Amerika Latin dan Karibia serta Eropa, maka objek EPA yang diteliti tidak akan dibatasi dengan memilih EPA tertentu.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan secara spesifik dan komprehensif diplomasi bilateral Jepang dalam studi kasus EPA yang melibatkan Jepang di tiga kawasan di dunia, berdasarkan kriteria pencapaian kepentingan ekonomi Jepang.
2. Menjelaskan dan memberikan gambar/pemetaan EPA Jepang, baik yang telah berhasil dibuat maupun masih dalam tahap negosiasi (*ongoing*) dari kurun waktu 2002-2009.

1.5 Signifikansi Penelitian

Meskipun sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas EPA yang melibatkan Jepang, tetapi sebagian besar pembahasan dari penelitian tersebut hanya menjadikan salah satu dari EPA tersebut sebagai topik pembahasannya, misal penelitian mengenai EPA Jepang-Indonesia (JIEPA), EPA Jepang-Singapura (JSEPA) dan seterusnya. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran detail berdasarkan kriteria pemilihan mitra EPA terhadap keseluruhan EPA yang telah melibatkan Jepang pada periode tahun 2002-kuartal pertama tahun 2009 di beberapa kawasan, sehingga akan diperoleh pemetaan komprehensif tidak hanya EPA tertentu secara parsial.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sumber bacaan pertama pada tinjauan pustaka penelitian ini menggunakan laporan berjudul "*Summary Of Study Report On The Japan-Chile Free Trade*

Agreement".²⁷ Dalam laporan singkat tersebut, JETRO mengungkapkan bahwa FTA Jepang-Chili akan membawa hubungan kedua negara menjadi lebih erat, terutama karena FTA tersebut akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara ekonomi. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, antara lain selama ini Jepang tidak memiliki hubungan ekonomi yang signifikan dengan kawasan Amerika Selatan. Untuk itu, jika Jepang ingin memperluas akses pasar mereka ke kawasan ini, maka FTA adalah solusinya. Terlebih Chili saat ini telah memiliki FTA dengan tiga negara anggota dari *North American Free Trade Agreement* (NAFTA),²⁸ yaitu Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. Di samping itu, Chili juga merupakan anggota dari MERCOSUR.²⁹ Keanggotaan tersebut menjadi krusial karena di saat yang berbarengan Chili juga memiliki FTA dengan negara-negara anggota kerjasama ekonomi Amerika Selatan/*South American Community of Nations* (SACN) seperti Columbia, Venezuela, Peru dan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan luasnya jejaring ekonomi Chili di kawasan regional Amerika Latin.

Kondisi ini sangat bersinergi dengan tujuan ekonomi internasional Jepang, yaitu memiliki peran penting dalam blok perdagangan Asia, Amerika dan Eropa. Sejauh ini Jepang memang telah menunjukkan konsistensinya dalam konstelasi ekonomi Asia, tetapi tidak demikian di Amerika Latin dan Eropa. Di kedua kawasan ini Jepang hanya berperan sebatas mitra dagang. Berdasarkan hal tersebut, jika Jepang bertekad memperbaiki posisinya dalam blok perjanjian perdagangan bebas Amerika/ *Free Trade Agreement of America* (FTAA) dan yang terutama membuka akses Jepang di pasar Amerika Selatan, maka mencapai kesepakatan pembentukan FTA dengan Chili merupakan sebuah keharusan.

²⁷ Japan External Trade Organization (JETRO), "Summary Of Study Report On The Japan-Chile Free Trade Agreement: Parallel Studies Recommend FTA between Japan and Chile" (June 7, 2001) diakses dari http://www.jetro.go.jp/en/reports/survey/epa/fta_chile/_summary_jetro20010607.html, tanggal 12 Maret 2009, pukul 23.52 WIB.

²⁸ Lihat International Monetary Fund (IMF), "*Regional Trade Arrangement: World Economic Outlook*", (Washington D.C: IMF, 1993). hal.110. Inisiatif pembentukan NAFTA dilakukan tahun 1993. Tujuannya adalah pengembangan suatu kawasan perjanjian perdagangan bebas di antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

²⁹ "Deskripsi Umum Hubungan Indonesia-Kawasan Amerika Latin", diakses dari <http://www.fealacindonesia.org/lang-in/indonesia-dan-latin-amerika/deskripsi-umum.html>, pada 12 April 2009, pukul 21.03 WIB. *Mercado Común del Sur* (Mercosur) dibentuk tahun 1991 oleh Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay guna memperkuat para anggotanya dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia. Mercosur memiliki pasar dan tarif impor bersama. Pada tahun 2006, Venezuela dan Chili bergabung menjadi anggota penuh Mercosur.

Selanjutnya sumber bacaan kedua pada penelitian ini adalah tulisan Michael Sutton berjudul *Japanese Trade Policy and Economic Partnership Agreements: A New Conventional Wisdom*, yang dimuat dalam *Ritsumeikan Annual Review of International Studies*, Vol.4 tahun 2005.³⁰ Menurut Sutton, rentetan peristiwa mulai dari buntutnya putaran perundingan WTO, terbentuknya blok-blok ekonomi di Amerika dan Eropa, pesatnya proliferasi FTA terutama di kawasan Asia, ditambah hantaman badai krisis yang melanda Asia pada tahun 1997, membuat Jepang mengubah cara pandanginya dalam melihat FTA. Jika semenjak bergabung dengan GATT tahun 1955 hingga 1998 Jepang menunjukkan keengganannya terlibat dalam pembentukan FTA dengan dalih kontradiksi terhadap mekanisme multilateral WTO, maka pasca tekanan dari rentetan peristiwa-peristiwa tersebut Jepang mulai mempromosikan pembentukan FTA dalam kerangka EPA.

Namun satu hal menarik yang diungkapkan Michael Sutton dalam tulisan tersebut adalah bahwa tercapainya kesepakatan pembentukan EPA antara Jepang dengan beberapa negara/kawasan ditentukan oleh keberhasilan dalam negosiasi sektor pertanian. Ini tampak dari negosiasi EPA Jepang-Meksiko dan EPA Jepang dengan negara-negara ASEAN. Dari negosiasi EPA tersebut terlihat jelas proteksi Jepang terhadap sektor pertaniannya. Jika pemerintah Jepang dalam setiap pernyataan resminya selalu menyatakan pembentukan EPA adalah dalam rangka mendukung dan mempercepat liberalisasi WTO, maka tidak demikian menurut Michael Sutton. Menurutnya, pembentukan EPA tidak hanya sebagai upaya Jepang dalam melakukan liberalisasi pasar. Tetapi yang lebih menonjol adalah sebagai strategi untuk mengamankan kepentingan Jepang di sektor pertanian.

Adapun sumber bacaan ketiga yang digunakan dalam tinjauan pustaka penelitian ini adalah tulisan Sukawarsini Djelantik dalam bukunya yang berjudul *Diplomasi antara Teori dan Praktek*.³¹ Dalam salah satu bab tulisannya, Sukawarsini Djelantik membahas secara khusus diplomasi ekonomi dan perdagangan. Menurutnya, telah terjadi perubahan dalam paradigma diplomasi. Dahulu kegiatan diplomasi konvensional hanya membahas isu-isu yang berkaitan dengan politik dan militer, maka kegiatan diplomasi modern memberikan

³⁰ Michael Sutton, *Loc.Cit.*

³¹ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktek: Diplomasi ekonomi dan Perdagangan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 242.

penekanan yang sama antara isu politik dan ekonomi. Diplomasi ekonomi melalui kontak-kontak dagang yang telah disepakati, jika diaplikasikan dapat menumbuhkan dan mengembangkan aktivitas ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sedangkan mengenai model-model diplomasi ekonomi yang dapat dikembangkan masing-masing negara, Djelantik berpendapat harus disesuaikan dengan karakteristik negara yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik negara tersebut. Adapun salah satu model diplomasi yang saat ini banyak diterapkan negara/kawasan di dunia mengambil bentuk kerjasama kawasan atau kerjasama ekonomi bilateral, seperti kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (APEC), kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Selatan (MERCOSUR), NAFTA, FTA dan seterusnya. Hadirnya kerjasama-kerjasama tersebut mengindikasikan semakin pentingnya kemampuan dan peran diplomasi ekonomi dalam konstelasi global.

1.7 Kerangka Teori

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan Bagaimana diplomasi bilateral Jepang dalam studi kasus EPA Jepang dengan beberapa negara/kawasan lainnya dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menempatkan EPA sebagai bentuk dari diplomasi bilateral Jepang di sektor ekonomi. Dan untuk menjelaskan EPA sebagai salah satu bentuk diplomasi bilateral Jepang, penulis akan menggunakan konsepsi mengenai diplomasi bilateral (*bilateral diplomacy*). Sedangkan untuk menjelaskan kaitan antara EPA sebagai bentuk diplomasi bilateral Jepang dengan kebijakan luar negeri Jepang dalam hal ini menyangkut pembentukan kesepakatan perdagangan regional (*Free Trade Agreement/FTA*) dalam kerangka EPA, penulis akan menggunakan konsep yang dapat menjelaskan kaitan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri.

1.7.1 Konsep Diplomasi

Banyak yang berpendapat diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri, karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar

negeri.³² Kebijakan luar negeri suatu negara tergantung kebijakan nasionalnya, sedang kebijakan nasional tergantung kepentingan nasionalnya. Untuk melindungi kepentingan nasionalnya, diperlukan instrumen politik luar negeri. Instrumen yang dapat digunakan adalah diplomasi.³³

Diplomasi memiliki beberapa konsep yang dipandang dalam perspektif berbeda. Beberapa ahli mencoba untuk memberikan definisi dari diplomasi, beberapa diantaranya adalah :

Berridge & James (2003) mendefinisikan diplomasi sebagai berikut:³⁴

“The conduct of relations between sovereign states through the medium of officials based at home or abroad, the latter being either members of their state’s diplomatic service or temporary diplomats”

Adapun menurut Morgenthau (1956), diplomasi didefinisikan sebagai sebuah seni dalam membawa elemen-elemen kekuatan nasional yang berbeda untuk mengatur masalah-masalah negaranya dalam situasi internasional dengan kekuatan dan efek yang maksimal dengan memperhatikan kepentingan nasional secara langsung.³⁵

Sedangkan R.P. Barston (1997) memandang diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya.³⁶ Sir Ernest Satow berpendapat hal yang sejalan dengan pendapat R.P.Barston mengenai definisi diplomasi. Mengutip pendapat Sir Ernest Satow (1922), menurutnya diplomasi adalah:³⁷

“The application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the Governments of Independent States, extending sometimes also to their relations with vassal states; or more briefly still, the conduct of business between States by peaceful means”.

³² Sukawarsini Djelantik, *Op.Cit.*, hal. 13.

³³ Sudijono, “Sengketa dengan Negara Lain”, dimuat dalam *Harian Suara Merdeka*, edisi 28 April 2005, diakses dari <http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/28/opi4.htm>, tanggal 11 April 2009, pukul 20.20 WIB.

³⁴ G. R. Berridge and Alan James, *A Dictionary of Diplomacy*, 2nd Edition, (Palgrave:London, 2003). hal.69-70.

³⁵ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 2nd edition, (New York: New Alfred A. Knopf, 1956), hal.129.

³⁶ R.P.Barston, *Modern Diplomacy*, (New York: Longman, 1997), hal.1.

³⁷ Sir Ernest Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, (New York: Longman Green&Co, 1922), hal.1.

Namun pandangan berbeda diungkapkan Harold Nicholson, menurutnya diplomasi adalah 1. Manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; 2. Merupakan bisnis atau seni para diplomat. Sedangkan K.M. Paniker mengatakan bahwa diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungan dengan negara lain.

Dari beberapa defeni diatas dapat diasumsi bahwasannya diplomasi adalah suatu usaha pemenuhan kepentingan nasional suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain atau dapat pula berarti "manajemen" bagaimana negara berhubungan satu sama lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Sementara itu, dalam konsepsinya mengenai kepentingan nasional dari suatu negara, Holsti menjabarkan pemahaman mengenai kepentingan nasional dalam istilah "tujuan nasional", yaitu citra mengenai keadaan atau kondisi suatu negara dalam sebuah sistem internasional pada suatu waktu tertentu dan menetapkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai oleh negara yang bersangkutan di masa mendatang dengan jalan mempengaruhi perilaku aktor-aktor lain di dalam sistem.³⁸ Sehingga penilaian berhasil tidaknya kegiatan diplomasi diasumsikan dengan menilai tujuan awalnya, yaitu tercapainya kepentingan nasional negara.

Untuk mencapai kepentingan nasional, kualitas dalam berdiplomasi merupakan syarat utama. Bahkan menurut Morgenthau, salah satu elemen dari *national power* adalah kualitas diplomasi.³⁹ Kekuatan diplomasi suatu negara akan menentukan posisi strategis negara tersebut di percaturan politik internasional, diplomasi menjadi *the first line of defense* bagi negara-negara kaya yang tidak memiliki kekuatan militer yang kuat dan sumber daya melimpah.

Diplomasi pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah di mana tujuan pemerintah saling bertentangan atau untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintah negara lain melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsesi, atau mengirimkan ancaman.⁴⁰ Hal senada diungkapkan

³⁸ Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, 6th Edition, (New Jersey:Prentice-Hall Inc, 1992), hal.271.

³⁹ Hans J. Morgenthau, *Op.Cit.*, hal.128.

⁴⁰ Sukarwani Djelantik, *Op.Cit.*, hal. 4.

Yoel Cohen, menurutnya tujuan diplomasi tidak lain adalah merubah sikap dan tingkah laku lawan.⁴¹

Terlepas dari banyaknya pendapat dan pemahaman tentang diplomasi. Konsep awal mengenai studi diplomasi telah banyak mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan sejak pertama kali diperkenalkan di Eropa yang ditandai oleh Konvensi Wina (1815). Terlebih pada dekade saat ini, ketika perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat. Hal tersebut berimplikasi salah satunya pada isu-isu dari studi diplomasi itu sendiri. Jika pada dekade awal diplomasi hanya bicara isu-isu tradisional yang tidak terlepas dari masalah perbatasan negara, kedaulatan dan keamanan, maka diplomasi modern mulai melahirkan isu-isu baru dalam studi diplomasi.⁴² Salah satu isu dalam diplomasi modern adalah lahirnya istilah “diplomasi bilateral” dan “diplomasi ekonomi”.

1.7.1.1 Diplomasi Bilateral dan Diplomasi Ekonomi

Menurut G.B Berridge, istilah diplomasi bilateral mengacu pada poin yang sangat sederhana, yakni hubungan politik dan budaya yang hanya melibatkan dua negara.⁴³ Sampai saat ini, sebagian besar diplomasi di tingkat internasional dilakukan secara bilateral. Contohnya penandatanganan perjanjian, tukar-menukar Duta Besar dan kunjungan kenegaraan. Selain diplomasi bilateral, terdapat alternatif diplomasi lainnya, yaitu diplomasi multilateral⁴⁴ dan diplomasi unilateral.

Sejak awal kemunculannya penerapan diplomasi bilateral sering memicu perdebatan. Perdebatan tersebut bergulir pada pertanyaan yang berkulat pada efektifitas penerapan diplomasi bilateral dan multilateral. Di antara kedua alternatif diplomasi tersebut, diplomasi bilateral dinilai kurang menguntungkan bila digunakan sebagai alternatif diplomasi, sehingga tidak jarang penerapannya

⁴¹ Yoel Cohen, *Diplomacy*, (New Jersey: Frank Cass, 1996). hal. 6.

⁴² Sukawarsini Djelantik, *Op.Cit.*, hal. 22.

⁴³ G.R. Berridge, *Diplomacy, Theory and Practice: Bilateral Diplomacy*, 2nd Edition, (New York: Palgrave, 2002).hal. 132.

⁴⁴ Sukarwani Djelantik, *Op.Cit.*, hal.135. Istilah “diplomasi multilateral” muncul ketika peran Duta Besar pada abad kedua puluh telah banyak berubah. Perubahan tersebut antara lain disebabkan mulai maraknya penyelenggaraan diplomasi melalui konferensi atau perundingan yang diikuti oleh paling sedikit tiga negara atau lebih. Pada konfensi atau perundingan seperti ini masalah yang dibahas memiliki cakupan, jangkauan, ukuran, tingkat kehadiran, masa berlangsungnya, serta birokrasi yang lebih luas daripada dalam diplomasi bilateral.

mengalami penolakan.⁴⁵ Namun belakangan diplomasi bilateral justru lebih banyak dirujuk sebagai alternatif diplomasi. Hal tersebut tidak lain karena sistem ini mempunyai fleksibilitas yang lebih luas, karena lebih mudah mencapai kompromi ketimbang sistem pada diplomasi multilateral. Selain itu, kesepakatan pada tingkat bilateral dirasa akan lebih mudah dicapai, karena negosiasi di sistem ini disesuaikan hanya dengan kebutuhan dari kedua negara yang terlibat.

Sementara itu, istilah diplomasi ekonomi muncul karena beberapa dekade belakangan kegiatan diplomasi memberikan penekanan yang sama pada kegiatan ekonomi dan politik. Jika sebelumnya kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang dianggap kurang penting dan dibebankan kepada Menteri Perdagangan atau ahli dari departemen lainnya, maka dewasa ini kegiatan membangun kerja sama ekonomi dan perdagangan menjadi fokus dari sebagian besar kegiatan diplomasi.

Diplomasi Ekonomi termasuk salah satu isu baru dalam studi diplomasi modern. Sebagai suatu hal yang baru tidak terdapat definisi yang ketat tentang diplomasi ekonomi. Berikut definisi diplomasi ekonomi yang diungkapkan beberapa ahli:

Diplomasi ekonomi dapat dimaknai sebagai *formulation and advancing policies relating to production, movement or exchange of goods, services, labor and investment in other countries*.⁴⁶ Sementara itu, H. Budi Mulyana⁴⁷ berpendapat diplomasi ekonomi dapat pula didefinisikan sebagai segala upaya untuk menjalin, meningkatkan dan memanfaatkan hubungan atau kerjasama dan apabila diperlukan dengan menggunakan kekuatan politik untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, secara umum definisi

⁴⁵ *Ibid.*, hal.135-136. Penolakan terhadap penerapan diplomasi bilateral pertama kali terjadi setelah berakhirnya PD I. Para politikus menilai tidak terhindarkannya PD I, karena sitem perjanjian internasional bilateral yang sangat kompleks pada saat itu. Situasi inilah yang kemudian menjadi awal mula terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang menerapkan aktivitas diplomasi multilateral. Reaksi yang sama menolak perjanjian dagang bilateral terjadi setelah depresi ekonomi dunia tahun 1930an. Kesepakatan-kesepakatan dagang bilateral menyebabkan terjadinya peningkatan tarif yang justru memperparah kejatuhan ekonomi beberapa negara. Maka pasca Perang Dunia, negara-negara barat mulai melakukan berbagai kesepakatan multilateral melalui *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT).

⁴⁶ Anak Agung Banyu Perwita, "Diplomasi Ekonomi Indonesia", dimuat dalam harian *Kompas*, edisi 28 April 2008.

⁴⁷ H. Budi Mulyana, "Pragmatisme Polugri Indonesia", dimuat dalam harian *Suara Pembaharuan*, edisi 12 April 2007.

diplomasi ekonomi merujuk pada diplomasi yang menempatkan isu kebijakan ekonomi sebagai fokus utamanya.⁴⁸

Dalam diplomasi modern istilah “diplomasi ekonomi” dibedakan dengan “diplomasi bilateral”. Istilah “bilateral” dalam diplomasi bilateral merujuk pada salah satu tingkatan pada *multilevel diplomacy*. Sementara itu, diplomasi ekonomi selain merujuk pada diplomasi yang menempatkan kebijakan ekonomi sebagai fokus utamanya juga bermakna *multilevel diplomacy*. Karena diplomasi ekonomi dapat beroperasi dalam tiga peringkat: a) bilateral; b) regional; dan c) multilateral. Sehingga tidak jarang hadir istilah yang menggabungkan keduanya, yaitu diplomasi ekonomi bilateral. Namun penggunaan atau penggabungan kedua isu dalam diplomasi modern tersebut tidak mesti dilakukan karena seringkali disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Kedepannya diplomasi ekonomi paling tidak menghadapi tiga isu penting.⁴⁹ hubungan antara ekonomi dan politik; hubungan antara lingkungan serta aneka tekanan domestik dan internasional; serta hubungan antara aktor negara dan non-negara (aktor privat/ swasta). Kombinasi ketiga hubungan itulah yang akhirnya menjadi salah satu warna utama dinamika hubungan internasional kontemporer.

Isu pertama mengacu pada kondisi di tengah perkembangan intensitas dan kompleksitas yang kian tinggi dari tiga pola interaksi itu serta isu ekonomi global yang kian rumit, hubungan ekonomi dan politik kerap tidak dapat berjalan seiring. Banyak kasus menunjukkan, isu-isu politik menjadi penghambat hubungan atau diplomasi ekonomi yang dimiliki negara. Sebaliknya, ada banyak kasus terjadi, di mana hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain terbentuk secara efektif tanpa disibukkan hubungan politik yang mereka miliki.

Isu kedua merujuk pada tingkat ekonomi domestik sebagai basis instrumen kebijakan ekonomi luar negeri (*economic foreign policy*). Dalam konteks ini, tingkat kesiapan domestik yang rendah kerap menjadi kerikil dalam meningkatkan diplomasi ekonomi suatu negara. Hal ini dimaknai sebagai rendahnya kesiapan domestik suatu negara atau kerap dimaknai sebagai rendahnya daya saing negara

⁴⁸ R. Saner , L. Yiu, “International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times”, dalam *Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations*, diakses dari http://www.transcend.org/t_database/pdfarticles/318.pdf, tanggal 12 April 2009, pukul 22.11 WIB.

⁴⁹ H. Budi Mulyana, *Loc. Cit.*

di bidang ekonomi dan perdagangan dibandingkan negara lain. Alhasil, tingkat kesiapan domestik dan daya saing negara juga akan menentukan kapasitas dan kemampuan ekonomi nasional suatu negara dalam arena ekonomi dan politik global.

Sedangkan, isu ketiga terkait kemampuan negara dan swasta dalam hubungan ekonomi/perdagangan internasional. Semakin harmonis hubungan pemerintah (negara) dan swasta serta kian tingginya tingkat koordinasi hubungan antara aktor negara dan non-negara, akan berdampak positif terhadap efektivitas diplomasi ekonomi yang dimiliki. Sebaliknya, banyak kasus di negara berkembang menunjukkan, betapa lemahnya hubungan dan rendahnya koordinasi antara sesama institusi pemerintah dan swasta. Akibatnya, diplomasi ekonomi yang dimiliki bersifat sporadis dan tidak dapat secara efektif mencapai kepentingan ekonomi nasional.

1.7.2 Teori Sistem

Menurut Robert Jervis,⁵⁰ teori sistem dapat dipakai untuk menjelaskan kaitan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri. Jervis berpendapat, sebuah sistem dibentuk oleh kenyataan yang berubah di satu bagian sistem serta menyebabkan perubahan di bagian lain. Perubahan dalam kebijakan luar negeri akan merubah praktik diplomasinya.

Terdapat dua premis utama dalam teori ini. Pertama, suatu tindakan diplomasi diasumsikan sebagai sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri, ini berarti diplomasi tidak dapat dilakukan tanpa didukung oleh suatu kebijakan luar negeri, sehingga suatu keniscayaan hadirnya tindakan diplomasi tanpa diawali perumusan kebijakan luar negeri terlebih dahulu. Premis kedua menyatakan sistem merupakan suatu ikatan yang saling terkait satu sama lain. Hal ini merujuk pada situasi di mana kejadian di satu wilayah akan berpengaruh terhadap wilayah lainnya. Perubahan-perubahan dalam hubungan antara dua negara akan mengarah pada perubahan di dalam kebijakan luar negeri negara lain. Hal tersebut merupakan implikasi dari sistem, di mana kebijakan dan kejadian telah bercabang-cabang dan meluas melalui waktu dan tempat yang jauh.

⁵⁰ Robert Jervis, "System Theories and Diplomatic History" dalam *Diplomacy* oleh Paul Gordon Lauren (Ed), 1979. hal.213.

1.8 Asumsi

Adapun asumsi yang dipakai dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri memiliki kaitan yang erat dengan diplomasi, karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri. Sementara itu, kebijakan luar negeri suatu negara berubah sesuai dengan keadaan, baik karena pengaruh keadaan di dalam lingkungan (domestik/internal) maupun luar negeri (eksternal) negara tersebut. Kaitannya dengan penelitian ini adalah EPA Jepang dengan negara/kawasan lainnya merupakan salah satu bentuk dari diplomasi bilateral Jepang. Diplomasi Bilateral tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan implementasi kebijakan luar negerinya, yaitu perubahan strategi perdagangan dari semula kerangka kerja multilateral WTO pada pembentukan kesepakatan perdagangan regional (*Free Trade Agreement/FTA*) dengan mengambil kerangka EPA.

1.9 Hipotesis

Pembentukan EPA Jepang dengan negara calon mitra yang memiliki karakteristik volume perdagangan tinggi, aktivitas bisnis yang akan timbul berkat EPA berkembang pesat, dan potensi kerugian ekonomi yang diakibatkan karena ketiadaan EPA relative tinggi, maka Jepang akan mendorong pembentukan EPA dengan negara calon mitra potensial tersebut. Tetapi proses pembentukan EPA akan didorong lebih cepat lagi jika negara calon mitra adalah negara pemasok energi ke Jepang (pengekspor komoditi migas) dibandingkan negara calon mitra yang hanya memasok komoditi non-migas meskipun keduanya berasal dari kawasan yang sama. Namun, jika Jepang dalam waktu yang hampir berbarengan melakukan peninjauan kesepakatan EPA dengan beberapa negara pemasok komoditi non-migas, maka Jepang akan terlebih dahulu mendorong pembentukan EPA dengan negara calon mitra yang berasal dari kawasan terdekatnya.

1.10 Model Analisis

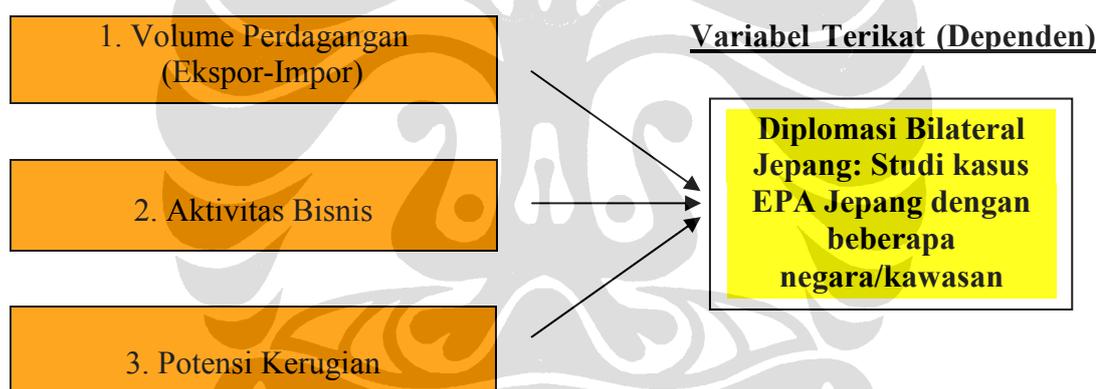
Demi kepentingan penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan satu kriteria dari tiga kriteria yang ada dan digunakan Jepang untuk mengidentifikasi

mitra EPA potensialnya.⁵¹ Dari ketiga kriteria tersebut, penulis memilih menggunakan kriteria kedua yang menyangkut pencapaian untuk kepentingan ekonomi Jepang.

Kriteria kedua ini sendiri terdiri atas 6 poin, tetapi karena penulis melihat beberapa keidentikan antara poin yang satu dengan yang lain maka penulis memutuskan menggabungkan poin-poin tersebut sehingga dihasilkanlah 3 poin baru yang merupakan rangkuman dari keenam poin isi dari kriteria tersebut. Penjelasan detail mengenai pengerucutan 6 poin dari isi kriteria tersebut akan dijabarkan pada bab kedua dari penelitian ini. Berikut adalah bentuk model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Variabel Bebas (Independen)

Kriteria Menyangkut Pencapaian
Kepentingan Ekonomi Jepang



Untuk dapat memahami pokok permasalahan pada penelitian ini, maka dibuat model analisis yang sekiranya dapat menggambarkan secara sistematis hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikatnya. Dalam penelitian ini, yang berposisi sebagai variabel bebas adalah Kriteria pemilihan mitra EPA Jepang yang kedua yang menyangkut pencapaian kepentingan ekonomi Jepang. Kriteria ini sendiri terdiri atas tiga (3) poin sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. Sedangkan yang berposisi sebagai variabel terikat dalam

⁵¹ Ketiga kriteria yang dimaksud adalah Pertama, kriteria menyangkut pembentukan lingkungan internasional yang menguntungkan bagi Jepang; Kedua, kriteria menyangkut pencapaian untuk kepentingan ekonomi Jepang; dan Ketiga, kriteria menyangkut kemudahan dalam merealisasikan pembentukan EPA.

penelitian ini adalah Diplomasi bilateral Jepang: dalam studi kasus EPA Jepang dengan beberapa negara/kawasan.

Berdasarkan gambar di atas, maka terpenuhinya tiga (3) poin isi yang dapat mewujudkan kriteria menyangkut pencapaian kepentingan ekonomi Jepang akan menentukan atau mempengaruhi diplomasi bilateral Jepang dalam hal ini menyangkut terbentuk atau tidaknya kesepakatan EPA Jepang dengan negara/kawasan yang bersangkutan.

1.11 Metodologi Penelitian

1.11.1 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, “proses” penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting dibanding dengan “hasil” yang diperoleh.⁵² Karena itu peneliti sebagai instrumen pengumpul data merupakan satu prinsip utama agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Sedang model metode penelitian yang digunakan adalah model metode **studi kasus** (*case study*). Pembatasan terhadap pendekatan studi kasus dapat dilakukan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci sehingga dapat menguji unit atau individu secara mendalam. Studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah EPA yang telah dan akan dibuat pemerintah Jepang dengan beberapa negara atau kawasan hingga tahun 2009. Adapun metode studi kasus ini akan menggunakan teknik ***congruence testing*** (uji keselarasan) yang memfokuskan pada nilai dari variabel bebas dan variabel terikat, untuk melihat apakah asumsi yang telah diprediksikan sebelumnya, selaras dengan hasil yang dikeluarkan.⁵³

1.11.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengambil bentuk penelitian eksplanatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan

⁵² Lawrence Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston-London:Allin and Bacon, 1997). hal.19-20.

⁵³ Andrew Bennet, *Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages*, dalam Detlef F. Sprinz & Yael Wolinsky-Nahmias, *Introduction: Methodology in International Relations Research*, 9Ann (Arbor: University of Michigan Press, 2004). hal.22-23.

hubungan antar variabel sehingga penelitian ini dapat melakukan pengujian hipotesa dan menguji hubungan sebab-akibat diantara variabel yang diteliti.

1.11.3 Sumber Data

Secara umum sumber data penelitian kualitatif ialah tindakan dan perkataan manusia dalam suatu latar yang bersifat alamiah.⁵⁴ Sumber data lainnya ialah bahan-bahan pustaka, seperti: dokumen, arsip, koran, majalah, jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan, dan lain sebagainya. Data statistik yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka -- seperti nilai investasi, konsumsi energi, dan lain-lain.⁵⁵

Khusus data dalam penelitian ini dikumpulkan dari beberapa buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet yang relevan, terutama situs resmi pemerintah Jepang, seperti situs JETRO, METI, MOFA, dan beberapa instansi terkait seperti WTO.

1.11.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan studi dokumen dan literatur. Studi dokumen adalah studi atau kajian yang dilakukan atas dokumen-dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan studi literatur adalah merupakan studi yang menggali kembali dasar-dasar ilmiah bertema serupa yang hendak diangkat melalui peninjauan karya-karya ilmiah bertema serupa yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Dalam teknik pengumpulan data ini, maka penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

1.12 Sistematika Penulisan

BABI : Bagian ini terdiri dari latar belakang permasalahan yang memberikan gambaran umum mengenai situasi, kondisi dan karakteristik objek penelitian yang menjadikannya menarik untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang memuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada bagian pembahasan/analisis. Selanjutnya adalah tujuan dan

⁵⁴ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989).

⁵⁵ *Ibid.*

signifikansi penelitian yang menjelaskan dasar dan arti penting dilakukannya penelitian. Bagian ini juga menyertakan kerangka teori yang akan digunakan sebagai alat analisa data dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka yang memaparkan literatur-literatur terdahulu yang terkait erat dengan topik penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan ini kemudian diakhiri dengan diajukannya model analisis, perumusan asumsi dan hipotesa penelitian sebagai acuan dasar yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian, yang meliputi: metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian yang dilakukan, sumber dan teknik pengumpulan data. Sebagai penutup, bagian ini akan disertai sistematika penulisan yang memuat rencana pembabakan laporan yang akan dibuat.

BAB II : Bagian ini terbagi ke dalam tiga sub-bab. Sub bab pertama pada bagian ini akan menjabarkan kebijakan dasar pembentukan EPA Jepang. Sedang sub bab kedua akan berisi penjabaran variabel penelitian yang akan digunakan. Variabel yang dimaksud adalah kriteria kedua yang menyangkut pencapaian kepentingan ekonomi Jepang sebagaimana yang telah dituangkan dalam *Basic Policy towards further promotion of Economic Partnership Agreements (EPAs)* tahun 2004. Kriteria tersebut akan digunakan sebagai parameter layak tidaknya suatu negara/kawasan diajak bermitra dalam EPA. Bagian akhir dari bab ini akan berisi penjabaran singkat dari isi kesepakatan masing-masing EPA.

BAB III : Bagian ini akan berisi pembahasan dan analisis terhadap 3 poin isi dari kriteria pencapaian kepentingan ekonomi Jepang. Dalam hal ini akan dilakukan analisis terhadap masing-masing negara mitra di tiga kawasan di dunia, di mana Jepang telah memiliki kesepakatan EPA, dengan berdasarkan 3 poin isi dari kriteria tersebut. Untuk mempermudah proses analisa, ketiga poin isi tersebut diubah ke dalam 3 faktor yang menjadi parameter dari kriteria tentang pencapaian kepentingan ekonomi Jepang. Berdasarkan hal tersebut, maka akan diperoleh hasil tentang ada/tidak keidentikan faktor yang berlaku terhadap masing-masing negara mitra. Jika sebaran pola faktor di masing-masing negara telah diketahui,

maka dapat ditarik kesimpulan mengenai ada/tidaknya keidentikan karakteristik faktor yang melatarbelakangi dibentuknya EPA Jepang di kawasan yang berbeda.

BAB IV : Sebagai bagian penutup, bab ini akan berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi terhadap implementasi EPA yang telah berhasil disepakati oleh Jepang dengan mitra EPA-nya termasuk di dalamnya perkiraan sebaran pola dari kriteria terhadap *ongoing negotiation* EPA Jepang di beberapa kawasan baru.

